

Nilai Pendidikan Politik Abad 21 Bagi Generasi Muda Menuju Warga Negara Yang Demokratis

Vinni Dini Pratiwi¹, Usman Alhudawi²

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Budidaya Binjai, Indonesia

ABSTRACT

The direction of political education is still mosaic and not global, policies, planning and budgeting are not based on the world. Ideally, the direction of political education is multicultural, namely development/education that is based on the idea of regulations, characteristics, wealth, various other needs, namely the needs of students, families, communities, various development sectors and their sub-sectors. In addition to developing local wisdom values while meeting the needs of global demands. The values of political education in the 21st century must be multicultural, emphasizing active, transformative citizenship, being open minded. This research uses literature study method. The use of this method with data collection techniques in which the study uses various books, journals, literature, notes, articles, research documents and various reports whose problems are related to the values of 21st century political education.

Keyword: Values, Political Education, Democratic, 21st Century

ABSTRAK

Arah pendidikan politik masih mosaik dan kurang mendunia, kebijakan, perencanaan, penganggaran yang kurang berpijak pada dunia. Idealnya, arah pendidikan politik bersifat multikultural yaitu pembangunan/ pendidikan yang berpijak pada gagasan peraturan, karakteristik, kekayaan, ragam kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan peserta didik, keluarga, masyarakat, berbagai sektor pembangunan dan sub-sub sektornya. Selain mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal seraya memenuhi kebutuhan tuntutan global. Nilai-nilai pendidikan politik di abad 21 harus bersifat multikultural menekankan pada aktif kewarganegaraan *transformative*, bersifat *open minded*. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Penggunaan metode ini dengan teknik pengumpulan data yang penelaahannya menggunakan berbagai buku, jurnal, literatur, catatan, artikel, dokumen penelitian dan berbagai laporan yang masalahnya berkaitan dengan nilai-nilai Pendidikan politik abad ke-21.

Kata Kunci: Nilai-nilai, Pendidikan Politik, Demokrasi, Abad ke-21

Corresponding Author:

Vinni Dini Pratiwi,
STKIP Budidaya Binjai,
Jl. Gaharu No. 147, Jatimakmur, Binjai Utara, Jati Makmur, Kec. Binjai,
Kota Binjai, Sumatera Utara 20746
Email: vinnipratiwi29@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1997, proyek *Education for Democratic Citizenship* (EDC) didirikan dengan tujuan untuk mengetahui nilai dan keterampilan yang diperlukan individu untuk menjadi warga negara yang berpartisipasi. Bagaimana mereka dapat memperoleh keterampilan ini dan bagaimana mereka juga dapat belajar untuk meneruskannya untuk yang lainnya. Elemen fundamental politik mencakup proses interaktif kolektif yang mengatur masyarakat dan membuat keputusan untuk kesejahteraan masyarakat anggotanya. Politik menembus bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengaruhnya, terutama dalam hal perumusan kebijakan, pelaksanaan

dan penegakan hukum tidak dapat diremehkan. Tampaknya, politik sering mendominasi diskusi seputar topik ilmiah dan teknologi terkait, setidaknya di Amerika Serikat kontemporer. Politik mungkin paling menonjol dalam hal perubahan iklim, tetapi perubahan iklim hanyalah salah satu dari banyak contoh di mana politik dan sains saling terkait. Contoh lain termasuk perdebatan tentang evolusi, penelitian sel induk, penggunaan berbagai vaksin, fracking, dan penggunaan tenaga nuklir. (Suhay, 2015: 2)

Studi politik sebagai konstruksi negara ideal dapat ditelusuri setidaknya sampai tulisan-tulisan para filsuf Yunani kuno Plato dan Aristoteles masih digunakan. Keduanya hidup dan mati sebelum 300 SM. Di Republik, Plato menjabarkan apa yang menurutnya akan menjadi negara ideal. Politik aristotelian adalah untuk meneliti perilaku aktual orang-orang yang terlibat dalam politik, dan dengan demikian berupaya untuk mendapatkan prinsip-prinsip umum yang mengatur perilaku politik masyarakat. Karenanya Aristoteles dikaitkan dengan permulaan politik terorganisir. Ia dianggap sebagai bapak pendiri pengaturan politik modern. Politik dengan demikian menjadi subjek yang relevan karena membantu dalam menjalankan urusan masyarakat dengan menetapkan prinsip-prinsip politik untuk kebaikan bersama.

Politik adalah ilmu atau seni mengatur urusan masyarakat dengan mengacu pada kepentingan yang dirasakan warga. Dengan cara ini, politik dipahami sebagai sistem untuk membuat keputusan (Pacho 2014:11). Seperti wewenang untuk membuat keputusan untuk negara diberikan kepada pemerintah oleh warganya. Pemerintah, yang dipahami di sini sama dengan negara, memiliki legitimasi untuk membuat dan menegakkan keputusan menggunakan berbagai senjata seperti legislatif, eksekutif, dan kehakiman. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dipatuhi oleh semua warga Negara dan efisiensi keputusan semacam itu tergantung pada seberapa luas keputusan tersebut diterima oleh masyarakat umum. Melalui pendidikan politik, siswa dapat berkenalan dengan proses legislatif dan juga kewajiban politik mereka.

Politik mencakup aspek kekuasaan dan otoritas dengan demikian, keputusan yang diambil ditegakkan oleh sistem politik. Unsur-unsur kekuasaan dan otoritas juga jelas dalam lembaga pembelajaran dalam hubungan yang ada antara siswa dan prefek, siswa dan guru, siswa dan administrasi, administrasi dan staf, kepemimpinan siswa dan dewan sekolah. Dengan demikian, cara lembaga-lembaga ini dikelola memiliki dampak besar pada kehidupan politik siswa. Cara organisasi siswa melakukan urusan mereka, misalnya, memenuhi syarat politik karena beberapa keputusan penting harus dibuat seperti keanggotaan, pemilihan umum, konstitusi, dan referendum. Namun, politik siswa atau politik organisasi sukarela berbeda dari politik negara dalam hal yang terakhir memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan keputusannya dapat didukung oleh penggunaan kekuatan yang sah. Karena tindakan siswa seperti demonstrasi kadang-kadang bertujuan untuk membujuk pemerintah untuk menerapkan atau tidak menerapkan beberapa kebijakan pendidikan politik menjadi disiplin yang lebih relevan di lembaga pendidikan. Misalnya, siswa dapat berdemonstrasi menentang kebijakan dan hukum pemerintah yang menindas. Seperti kenaikan biaya yang tidak masuk akal, yang selanjutnya dapat mendorong siswa miskin keluar dari lembaga pembelajaran. Tindakan seperti itu diarahkan pada pemerintah umumnya dianggap politis. Terbiasa melalui dengan politik, siswa akan dapat belajar cara, sikap, dan disposisi terbaik untuk membuat tindakan seperti itu lebih bermanfaat tanpa merusak martabat dan hak asasi manusia.

Daerah partisipasi politik mungkin termasuk debat politik, demonstrasi politik, keanggotaan dalam organisasi politik dan serikat buruh, serta berpartisipasi dalam pemilihan proses melalui voting dan memimpin proses pemungutan suara. Selain itu, pengetahuan tentang berbagai pengalaman politik diperlukan jika siswa ingin mengevaluasi secara kritis politik lembaga dan kegiatan. Mempelajari politik akan meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai konsep politik seperti kedaulatan, negara, kewajiban politik, dan hubungan antara individu dan sistem politik. Pengetahuan tentang urusan politik akan membantu siswa untuk objektif dan kritis meneliti secara pemimpin dan struktur politik.

Pernyataan ini juga didukung oleh Nicholson dan Meier (2010:2) yang menjelaskan bahwa:

Struktur politik menentukan kekuasaan dan bahwa organisasi struktur adalah instrumen politik, posisi, dan kekuasaan. Dia berpendapat bahwa adakritis perbedaan antara jenis kelembagaan dalam hal komposisi otoritas pengarah (tunggal atau multi-berkepala), kualifikasi untuk penunjukan, prosedur untuk penunjukan dan pemindahan pejabat utama, metode pembiayaan, anggaran dan kontrol audit, kepegawaian peraturan, dan dewan penasihat dan komite.

Oleh karena itu, siswa akan ditempatkan dengan lebih baik untuk mengidentifikasi jenis-jenis sistem politik yang akan disesuaikan dengan promosi kesejahteraan penduduk. Pengetahuan tersebut akan membantu siswa untuk memperbaiki dan mengkritik kekurangan politik kegiatan seperti kecurangan dalam proses pemilihan dan sebagai hasilnya memastikan politik yang kinerja baik. Studi politik memiliki potensi membawa transformasi sosial. Ini dimungkinkan karena pemahaman yang baik tentang politik di kalangan siswa akan memberdayakan mereka, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik mereka. Karena itu mereka dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam urusan publik dengan mengadvokasi kebijakan sosial-

ekonomi yang adil. Partisipasi politik mewakili kondisi dasar demokrasi, di mana warga Negara, melalui kegiatan politik mereka, mencoba untuk berdampak pada keputusan yang dibuat oleh para pemimpin politik dan diberbagai tingkat sistem politik (Memoli dan Vassallo, 2016:2).

Studi politik melibatkan studi tentang sistem yang saling berhubungan dengan sosial, struktur ekonomi, dan budaya. Struktur ini tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia dan kesejahteraan. Mempelajari politik akan memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara politik, fenomena ekonomi, budaya, dan sosial. Ini akan meningkatkan pemahaman siswa tentang dinamika perubahan dan karenanya menarik generalisasi tentang proses politik. Mempelajari politik akan membantu siswa untuk lebih memahami struktur politik dan bagaimana struktur bekerja sehingga berkontribusi untuk memperbaiki sistem politik. Studi ini meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai dalam politik dengan mengkomunikasikan kepada para siswa ideologi berbagai sistem politik seperti sistem demokrasi dan diktator. Informasi yang diperoleh akan berguna dalam membuat penilaian nilai tentang sistem politik tertentu sehingga dapat menerima atau menolaknya.

Dengan demikian studi politik memungkinkan siswa untuk memahami berbagai bentuk pemerintahan dan karenanya membuat pilihan berdasarkan informasi dengan pengetahuan tentang tujuan dan fungsi masing-masing. Pemahaman politik yang baik dapat meningkatkan kebenaran dan kesetiaan dalam janji seseorang dengan menekankan pentingnya moralitas dalam politik. Ini dapat membantu mencegah korupsi, yang telah menjadi pertumbuhan "kanker" di banyak negara, terutama di bidang politik, dan dengan demikian membawa kewarasan pada kegiatan politik. Ini juga dapat membantu membentuk karakter masyarakat dengan menanamkan budaya diplomasi dan demokrasi di dalamnya. Dengan demikian orang dapat menahan diri dari tindakan kekerasan dalam upaya untuk mengatasi beberapa masalah politik seperti reformasi konstitusi dan krisis pemilu.

Ilmu politik akan memberikan siswa informasi tentang berbagai ideologi politik seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Dengan demikian mereka akan dapat membuat terinformasi dengan baik keputusan yang mengenai aspek-aspek dari berbagai ideologi untuk membuat sendiri. Mereka juga akan terkena berbagai teori politik seperti teori keadilan dengan diberikan fakta yang dapat dipercaya dan obyektif tentang fenomena politik tertentu pada waktu tertentu. Kebanyakan orang tidak mengetahui hak dan kewajiban dasar dan mendasar mereka. Misalnya, sekelompok orang tertentu mungkin mengakui bahwa mereka memiliki hak untuk mogok atau berdemonstrasi, tetapi mereka mungkin tampaknya tidak menyadari hak-hak orang yang tidak berdemonstrasi yang tidak berdosa yang mereka anggap sebagai objek kekerasan. Oleh karena itu, orang harus menyadari hak dan kewajiban mereka untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam pemerintahan. Ini dapat ditingkatkan dengan memberikan siswa pengetahuan politik dan kewarganegaraan.

Demokrasi politik untuk bertahan lama jika mayoritas penduduk tetap tidak tahu. Politik mendominasi media massa internet, koran, radio, dan televisi. Ini menyiratkan bahwa politik adalah fenomena yang mencolok. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang proses dan institusi yang membuat keputusan dalam masyarakat tampaknya sangat penting. Jenis pemahaman yang dapat dicapai seseorang dalam mempelajari politik mencakup pengetahuan tentang siapa yang membuat keputusan, dasar pemikiran untuk keputusan itu, dan untuk kesejahteraan siapa keputusan itu dibuat. Ini Informasi sangat penting jika satu adalah untuk mendukung, mengusulkan amandemen, atau menantang keputusan sebagai warga negara atau sebagai anggota organisasi sosial.

Meskipun studi politik penting, masyarakat harus memahami bahwa studi saja tanpa niat baik tidak dapat menyelesaikan masalah politik seperti kediktatoran dan korupsi. Terlepas dari kenyataan bahwa studi politik dapat membantu mengubah sikap, pikiran, dan perilaku seseorang, mungkin sulit untuk menilai dampak dari mempelajari politik dalam kaitannya dengan praktik politik karena perilaku beberapa politisi bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, meskipun mereka memegang gelar dalam ilmu politik. Ada kebutuhan untuk partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam politik keputusan untuk berusaha mencapai masyarakat yang adil dan manusiawi. Mempromosikan politik yang baik sistem harus menjadi tanggung jawab semua segmen masyarakat, yang meliputi individu, masyarakat sipil, gereja, media massa, organisasi sukarela dan komunitas internasional. Meskipun banyak orang memiliki gagasan umum tentang apa itu politik, ada banyak kesalahpahaman tentang politik. Sebagai contoh, beberapa orang memandang politik sebagai permainan kotor atau sebagai kegiatan yang hanya terbatas pada politisi.

Kesalahpahaman ini dapat diperbaiki dengan mempelajari pelajaran setidaknya satu mata pelajaran wajib yang luas dan seimbang dalam politik atau kewarganegaraan selama sekolah menengah. Di universitas, mata kuliah politik harus ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan dan jurusan akademik. Ini dapat memberikan hasil yang baik bagi masyarakat dengan memberi siswa kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengejar apa yang paling mereka sukai dan tertarik. Untuk keperluan itu tulisan ini melihat perkembangan bagaimana implementasi atau perwujudan nilai-nilai pendidikan politik abad ke-21. Tulisan ini beragumen tentang pentingnya membantu siswa untuk menerapkan kompetensi profesional mereka dalam upaya politik untuk

mengelola sumber daya masyarakat secara adil dan profesional.

Salah satu unsur utama awal kebijakan pendidikan adalah pergulatan politik yang sengit selama abad ke-19 antara kaum liberal dan kaum konservatif, yang ditafsirkan sebagai program utama sekularisasi di pihak kaum liberal dan sistem pendidikan yang dipimpin oleh Gereja Katolik dari kaum konservatif. Perjuangan liberal-konservatif ini diekspresikan dan sebagian diselesaikan dalam Undang-Undang Instruksi Primer yang diberlakukan pada tahun 1860, yang di satu sisi memberikan keunggulan bagi negara dalam arena pendidikan, dan di sisi lain menghasilkan kesenjangan sosial yang besar dan juga menegaskan subsidi pemerintah untuk pendidikan swasta.

Ilmu politik diposisikan dengan baik untuk mengambil peran kepemimpinan, dalam ilmu sosial untuk memeriksa isu-isu yang menantang terkait dengan transformasi demografis yang dramatis dan kompleksitas terkait kepentingan politik yang terjadi di Amerika Serikat dan banyak negara lain di seluruh dunia. Studi tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam kebijakan publik bisa dibalang jantung dan jiwa ilmu politik dalam memberi bidang tanggung jawab besar untuk secara langsung berkontribusi dalam membantu warga memahami sepenuhnya konsekuensi dari pilihan mereka dan pemerintah yang mereka buat. Ruang kelas menjadi arena mungkin di mana ilmu politik memiliki peluang terbesar untuk menunjukkan apa yang dapat dikontribusikannya untuk membuat semua warga negara menjadi peserta yang lebih terinformasi dalam menentukan masa depan mereka sendiri. (Fraga et al, 2011:38-39)

Pendidikan politik menciptakan percabangan utama dalam perjalanan sejarah. Menggunakan konsep utas kebijakan untuk merujuk pada pertanyaan politik tertentu yang berulang, seperti pilihan sekolah. Mengklaim bahwa bifurkasi menciptakan ketergantungan jalur yang tertanam dalam penciptaan dan ketiadaan institusi, dan ini kemudian mempersempit peluang untuk perubahan di dalam keseluruhan sistem. Seppanen et al (2015:54) menjelaskan bahwa teori kompleksitas dan gagasan bifurkasi memberikan kontribusi besar dalam hal memahami dinamika politik. Bifurkasi adalah konsep penting dalam hal memahami perubahan yang menciptakan sejarah, seperti yang kita kenal.

Perdebatan tentang sekolah dasar sekali lagi wajib membagi kaum liberal (sebagai pendukung) dan kaum konservatif (sebagai penentang) pada awal ke abad-20. Ini menjadi tertanam dalam struktur kelembagaan, menciptakan percabangan mendalam yang didirikan antara sekolah swasta dan pendidikan yang didanai publik. Negara Pengajaran (*Estado docente*) secara bertahap dibangun selama paruh kedua abad ke-19 dan dikonsolidasikan melalui undang-undang 1920 yang memberikan keunggulan negara atas pendidikan swasta. Alasan utama untuk melakukan ini adalah untuk memastikan bahwa siswa akan secara resmi dievaluasi, dan untuk menetapkan kurikulum baik. Dan ini menjadi pusat perhatian bagi para ilmuwan. Karena menetapkan kurikulum yang baik adalah suatu hal yang rumit.

Masalah ini juga diteliti oleh Joseph, S. (2015:15) yang menyatakan:

Pengembangan kurikulum adalah proses rumit yang membutuhkan perencanaan yang luas jika memang implementasi ingin berhasil. Dalam masyarakat yang bermuatan politik, tugas pengembangan kurikulum menjadi semakin sulit dengan manipulasi politik melalui kelompok dan organisasi penekan eksternal. Kecerdikan politik merupakan kualifikasi yang sangat diperlukan bagi para pemimpin dan pengembangan kurikulum yang beroperasi di lingkungan politik yang begitu kompleks.

Pekerja kurikulum juga harus belajar untuk menguasai secara cerdas dalam suasana politik seperti itu. Sementara, intervensi politik yang tidak diperiksa dari sumber non-pendidikan dapat mengancam kualitas program pendidikan, pengembang kurikulum dapat memanfaatkan proses politik untuk melembagakan perubahan. Tujuannya adalah untuk untuk mempertimbangkan pendidikan apa yang paling baik mempersiapkan kita untuk kegiatan politik, dan kegiatan politik secara samar didefinisikan sebagai menghadiri pengaturan umum dari sekelompok orang yang berkesempatan atau telah menyatukan pilihan. Kata "umum" akan muncul untuk membawa implikasi bahwa pemerintah merasa tidak praktis untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari masyarakat di mana mereka memiliki yurisdiksi. Dan tidak ada negara yang dapat mencampuri detail rumit dari situasi individu, dan definisinya tentang negara menggabungkan kondisi sekarang saat ini.

Jika abad ke-20 memiliki pelajaran bagi kita, pasti inilah yang terjadi, perincian kecil tentang perilaku pribadi yang dapat menjadi masalah yang menjadi perhatian publik oleh negara mana pun yang diperlukan memiliki keinginan dan kekuatan yang untuk melakukannya. Pada kenyataannya bahwa beberapa negara berhasil mengendalikan aspek perilaku yang dinyatakan sebagai pribadi yang sakral oleh tradisi liberal barat. Menggambarkan kegiatan negara totaliter sebagai menghadiri pengaturan umum suatu masyarakat dan menghilangkan kata "jenderal dari seluruh kekuatannya". Untuk membatasi pokok persoalan definisi ke sejumlah masyarakat yang kita sebut negara keliru di sisi kesewenang-wenangan. Profesor Oakeshott (1953:69) mengatakan bahwa pemerintah harus membatasi diri untuk mengelola urusan umum masyarakat

yang mereka kontrol. Seperti yang akan kita lihat, ada kesempatan lain ketika tidaklah mudah untuk memutuskan apakah kita berada di ranah fakta atau nilai.

Disini kita menemukan diri kita dijumpai masalah dengan alasan valid untuk perubahan politik. Perubahan itu tampak dengan berkembangnya teknologi yang telah menjadikan komputer menjadi alat yang sangat diperlukan untuk komunikasi dan bekerja untuk orang-orang modern, dan telah menjadikan media baru dengan komputer sebagai perwakilannya yang luar biasa untuk dikenal, diperhatikan dan digunakan oleh semakin banyak orang muda. Model pengajaran tradisional telah diubah secara signifikan oleh pengajaran online dan komunikasi online. Media baru telah menempati bidang pendidikan dengan cepat, dan telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari puluhan ribu siswa, memengaruhi mode berpikir siswa setiap saat dan mengubah tingkat kognisi mereka dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Sementara itu, perkembangan media baru telah membawa peluang dan tantangan bagi pendidikan ideologi dan politik. Penekanan dan masalah pendidikan ideologis dan politik di dalam mode yang ada terletak pada bagaimana memanfaatkan alat media baru secara wajar untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan media baru yang lebih baik, dan untuk mempelajari pendekatan yang lebih ilmiah untuk mengatasi tantangan yang dibawa oleh lingkungan media baru untuk pendidikan ideologis dan politik.

Meningkatnya teknologi dan media sosial di zaman sekarang ini, memudahkan masyarakat dan siswa dalam mendapatkan informasi. Baik itu berupa informasi mengenai pendidikan, ataupun dunia. Ilmuwan politik telah mempelajari hubungan antara media dan politik dari berbagai perspektif. Di sini, kita akan fokus pada empat aspek media interaksi politik. Dery dan Puopiel (2013:1) mencatat bahwa radio adalah sarana pendidikan ilmiah yang luar biasa untuk pencerahan politik, dan kemajuan sosial budaya. Pernyataan seperti itu menggaris bawahi peran yang dapat dimainkan radio dalam meningkatkan kehidupan orang-orang melalui penyebaran informasi. Sebagai sarana komunikasi massa, radio diharapkan dapat menyebarkan informasi dan berita yang relevan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat ini, yang disebut sebagai lokalisme, adalah ide-ide yang memandu perkembangan radio di Amerika Serikat. Grigsby (2009:276) juga menyatakan bahwa hubungan media mengilustrasikan baik siapa maupun ketidak merataan globalisasi. Yaitu, liputan media tentang peristiwa-peristiwa politik lebih luas dalam jangkauannya daripada sebelumnya konsisten dengan gagasan tentang batas-batas keropos di arena global meskipun liputannya tersebar secara tidak merata.

Media dan teknologi bisa dapat digunakan untuk memberikan fleksibilitas untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda dan "kecerdasan majemuk" (*Gardner*) dan untuk mendukung pengembangan keanekaragaman budaya, pengetahuan lokal, dan pluralisme. Terutama selama seminar pelatihan yang didedikasikan untuk "Belajar dan Mengajar untuk Kewarganegaraan Demokratis, Pendekatan Kritis untuk Media dalam Pendidikan Kewarganegaraan". Dalam salah satu seminar ini, isi utama literasi media, untuk secara khusus terdiri dari 12 tema luas yang terhubung ke berbagai bidang pengajaran, untuk siswa berusia 10 hingga 18 tahun:

1. Membaca Berita

Area pengajaran: pendidikan kewarganegaraan, studi tentang pemerintah. Relativisme perwakilan dalam program politik. Apa itu politik dan apa yang tidak ada dalam berita. Berita lingkungan, yang lain, wanita dan pria, orang gay, bangsa dan minoritas nasional.

2. Bagaimana mereka Menghasilkan Media?

Area pengajaran: pendidikan kewarganegaraan, mata pelajaran sosial. Kunjungan pribadi ke stasiun TV dan radio, kantor editorial, media lain. Dokumenter.

3. Akses ke Informasi

Bidang pengajaran: pendidikan kewarganegaraan, studi tentang pemerintah dan hukum, metode pedagogis umum. Dari kebebasan berbicara dan kebebasan pers hingga hak untuk mendapat informasi. Akses ke informasi pemerintah sebagai ujian pemerintah yang demokratis.

4. Membaca Iklan

Bidang pengajaran: pendidikan kewarganegaraan, mata pelajaran sosial, sejarah, sejarah seni. Konteks produksi, sosial, ekonomi dan politik dari iklan. Sejarah iklan. Bahasa visual iklan.

5. Membaca fiksi

Bidang pengajaran: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan seni visual, teori film, sejarah seni. Televisi, fiksi, film, video game, realitas virtual. Relativisme perwakilan dalam program fiksi misalnya sabun: Yang Lain, wanita dan pria. Orang gay, bangsa dan minoritas nasional. Struktur naratif dan struktur mitologis.

6. Sejarah Teknologi Media

Bidang pengajaran: pendidikan kewarganegaraan. Menulis, mencetak, film, radio, televisi, konvergensi media dan penggunaan serta pengaruhnya (termasuk tujuan propaganda) dalam

perspektif sejarah.

7. Lembaga Media dan Peraturannya

Wilayah Pengajaran: sejarah, pendidikan kewarganegaraan.

Topik:

- konsep kebijakan media; hukum, dewan pengawas dan peraturan lainnya
- kekurangan frekuensi
- penyiaran layanan publik
- penyiaran komersial
- kabel dan satelit; era pasca-kelangkaan
- Internet dan multimedia.

8. Teori Sosial dan Media

Pengajaran bidang: sejarah, pendidikan kewarganegaraan.

9. Aktivisme Internet

Area pengajaran: metode pedagogis umum, pendidikan media, pendidikan internet, pendidikan kewarganegaraan, kegiatan ekstrakurikuler. Melek Internet dan menjelajahi internet konvergensi media tantangan bagi para guru

10. Hasilkan Media

Area pengajaran: pendidikan media, pendidikan kewarganegaraan, metode pedagogis umum, kegiatan ekstrakurikuler, olahraga. Area aktivitas media di sekolah:

- presentasi rekaman video di ruang kelas dan di tingkat sekolah
- koran sekolah
- radio sekolah
- membuat halaman Internet. (Birzea 2000: 50)

Ideologi dan politik di kalangan masyarakat dan pendidikan sekolah selalu berada pada posisi penting. Bersamaan dengan boomingnya perkembangan industri media baru. Informasi jaringan dapat dilihat di mana-mana. Selain itu, mahasiswa modern memiliki karakteristik mengejar kemandirian, pengkhianatan, pemberontakan, keingintahuan yang kuat dan pemikiran yang rumit, yang telah meningkatkan kesulitan dalam pendidikan ideologis dan politik. Dan masih banyak masalah yang juga ada dalam pendidikan khusus (Zhang, 2015:2428).

Pendidikan ideologis dan politik pada saat yang sama, juga harus melihat pendidikan orang dewasa pendidikan ideologis dan politik memiliki banyak masalah. Yu (2015:767) menjelaskan untuk studi teori politik, peningkatan kesadaran ideologis, seringkali mereka anggap dapat ditiadakan, karena itu membuang-buang waktu. Banyak siswa yang lebih tua, psikologis mereka memiliki lebih banyak untuk menyelesaikan desain, beberapa kesulitan dan frustrasi hidup dan pengalaman kerja sering mempengaruhi kepercayaan politik mereka, dikombinasikan dengan kehidupan sosial mahasiswa pendidikan tinggi dewasa lebih rumit daripada mahasiswa biasa, kepercayaan politik mereka lebih mudah dipengaruhi oleh berbagai ide daripada hanya sebagai mahasiswa, kondisi semacam ini bagi pendidikan mahasiswa ideologi dan pendidikan politik mengajukan tantangan berat.

Profesor Oakeshott (1953:69) mengatakan bahwa pendidikan politik kita perlu diberitahu jika sesuai, harus terkait dengan kegiatan politik itu sendiri. Kita tidak bisa meresepkan pendidikan seolah-olah terlepas dari persiapan untuk kegiatan politik. Mengetahui kegiatan politik apa yang memberikan petunjuk penting tentang sifat pendidikan dan, sebagai bantuan untuk memahami politik, dua konsepsi saat ini menjadi sasaran kritik, meskipun kami tidak diberi indikasi sebagai protagonis mereka. Yang pertama memandang politik sebagai empiris murni aktivitas (tanpa kebijakan politik).

Mengetahui kegiatan politik apa yang memberikan petunjuk penting tentang sifat pendidikan dan, sebagai bantuan untuk memahami politik, dua konsepsi saat ini menjadi sasaran kritik, meskipun kami tidak diberi indikasi sebagai protagonis mereka. Yang pertama memandang politik sebagai empiris murni aktivitas.

Kegiatan politik digambarkan sebagai "memperhatikan", bukannya "membuat, seperangkat pengaturan" untuk memunculkan gagasan bahwa pengaturan itu dari masyarakat mana pun, sebagian besar terdiri dari cara-cara perilaku yang telah diwarisi anggotanya dan tidak dirancang untuk dirinya sendiri. Dalam batas tertentu, pengaturan ini dibuat oleh mereka yang tinggal bersama mereka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*Literature Research*). Penggunaan metode ini dengan teknik pengumpulan data yang penelaahannya menggunakan berbagai buku, jurnal, literatur, catatan, artikel, dokumen penelitian dan berbagai laporan yang masalahnya berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan memang harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tetapi ini tidak sama dengan menganggap diri anda sebagai stasiun layanan untuk neo-kapitalisme. Pernyataan ini juga didukung oleh Dorling (2016:174) yang menyatakan bahwa ketika orang mendapatkan lebih banyak pendidikan, mereka menjadi lebih sadar akan kemampuan mereka sendiri, memiliki lebih banyak ruang untuk meningkatkan kemampuan itu, dan merasa lebih dihargai dan diakui oleh orang lain. Tidak seperti berbagi tanah, perumahan, dan banyak kekayaan materi lainnya, pendidikan bukanlah permainan nol.

Setiap orang dapat merasa lebih dihargai dan dididik lebih baik tanpa orang lain yang membutuhkan lebih sedikit, tetapi untuk mencapai ini membutuhkan politik yang lebih baik daripada yang kita miliki saat ini. Pendidikan di Inggris harus lebih tentang belajar menjadi kreatif dan lebih sedikit tentang menyesuaikan diri dengan silabus yang tidak imajinatif dan lulus ujian. Maka dari itu nilai-nilai pendidikan politik harus lebih bersinerji.

Nilai-nilai politik mungkin memiliki asal-usulnya di luar politik, tetapi bagi mereka berfungsi sebagai nilai-nilai untuk domain politik, yaitu menjadi nilai yang kami cita-citakan untuk diwujudkan dalam praktik, standar evaluasi yang dengannya kami menilai tindakan agen politik, atau kategori yang melaluinya kita berupaya memahami kehidupan politik, haruslah mungkin bagi kita untuk memandangnya konsisten dengan ciri-ciri konstitutifnya. Bagian berikut ini kemudian memeriksa sejauh mana prasyarat untuk realisasi nilai-nilai dalam praktik harus memperhitungkan dalam pertimbangan kita, apakah mereka adalah nilai-nilai yang cocok untuk masyarakat kita. Salah satu cara berpikir tentang bagian-bagian ini adalah sebagai respons terhadap dua pertanyaan berbeda tetapi terkait yang bisa kita tanyakan mengenai nilai: masing-masing, “apakah ini nilai politik?” yang mengatakan, apakah itu nilai yang sesuai untuk ranah politik, dan kemudian “apakah ini nilai politik bagi kita?”, yaitu untuk menanyakan pertanyaan lebih lanjut tentang seberapa jauh mungkin nilai yang cocok atau dimiliki ke dunia sosial kita (yang termasuk tetapi tidak habis oleh kekhawatiran potensial tentang apakah masuk akal bagi kita untuk bercita-cita mewujudkan nilai itu di sini dan sekarang). Pernyataan ini juga halnya disampaikan oleh Sleat (2016:2) makna nilai-nilai politik dapat dipahami secara cukup independen dari setiap akun karakter domain politik, saya menyarankan bahwa makna nilai politik hanya dapat dipastikan dalam setidaknya deskripsi politik yang masuk akal sebagai ruang kegiatan manusia yang berbeda. Dalam cara-cara ini adalah keliru untuk mempertahankan bahwa filsafat politik tidak perlu mengakui apa pun pada realitas politik.

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini pada mulanya berasal dari gagasan yang masuk akal, tetapi pada tingkat yang lebih dalam mereka menyerukan konsepsi tentang manusia yang didasarkan pada kebebasan dan martabat yang sama dari setiap individu. Individu membangun diri dan hubungannya dengan orang lain sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Dimensi etis yang selalu ada ini mencakup aspek afektif dan emosional. Beberapa orang percaya bahwa penerimaan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi seharusnya hanya merupakan hasil dari konstruksi rasional, sedangkan yang lain percaya bahwa tidak cukup untuk mendeskripsikan penerimaan untuk memperolehnya. Aspek afektif dan emosional selalu hadir setiap kali seseorang menganggap diri sebagai individu dalam kaitannya dengan orang lain dan dengan dunia. EDC juga menyerukan untuk bekerja pada aspek-aspek ini. Kewarganegaraan tidak dapat direduksi menjadi katalog hak dan kewajiban, tetapi melibatkan keanggotaan suatu kelompok atau membawa identitas ikut bermain dengan cara yang sangat mendalam. Konsekuensinya memerlukan perubahan etis yang mencakup dimensi emosional pribadi dan kolektif. Banyaknya, nilai-nilai yang terlibat, di mana pekerjaan konstruksi dan refleksi diperlukan, berpusat pada kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Mereka menyiratkan pengakuan dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, kemampuan untuk mendengarkan, merefleksikan tempat kekerasan dalam masyarakat dan bagaimana mengendalikannya penyelesaian konflik. Mereka menuntut penerimaan positif atas perbedaan dan keragaman, mereka membutuhkan kepercayaan pada yang lain. Moellendorf (2007:216) menyatakan bahwa masalah pragmatis yang berhadapan dengan masyarakat yang secara adil menggunakan nilai-nilai yang terkait dengan konsepsi kewarganegaraan yang secara implisit diterima dalam tradisi politik masyarakat demokratis liberal.

Dalam hubungan ini, kita perlu melampaui konsepsi toleransi yang sangat sempit, kebutuhan yang begitu sering diberitakan. Faktanya adalah toleransi tidak terbatas pada penerimaan perbedaan, suatu penerimaan yang terkadang acuh tak acuh itu membutuhkan pengakuan batas-batas diri sendiri dan menganggap orang lain sebagai wali, sama dengan diri sendiri, bagian dari kemanusiaan setiap individu perlu orang lain untuk membangun

Terlepas dari perbedaan dalam setiap definisi dan antar bahasa, ada beberapa titik penahan umum yang dengan demikian memberikan dasar yang kuat untuk mengejar eksplorasi kewarganegaraan kami. Itu selalu merupakan masalah menjadi bagian dari komunitas, yang menjerat politik dan hak, terutama hak politik. Dalam pengertian ini, warga selaku seseorang yang ini adalah masalah rumit juga. Sementara masing-masing

mengeskripsikan dirinya dalam konteks budaya dimana ia berasal, budaya ini tidak berarti homogen atau tertutup. Di setiap Negara Eropa ada perdebatan, seringkali cukup panas, yang mempertanyakan konsepsi kehidupan sosial dan politik. Terakhir, tidak ada yang mewakili suatu budaya, tidak ada budaya yang di wakili oleh seseorang.

Hak budaya dengan demikian dianggap sebagai generasi baru dari hak asasi manusia, setelah hak sipil, hak politik dan hak ekonomi dan sosial. Sementara ada kesepakatan yang cukup luas tentang pentingnya hak-hak budaya ini, dan tentang apa yang membenarkannya, seperti penghormatan terhadap keragaman budaya dan penegasan kekayaan pertukaran dan pemupukan silang, aktualnya memperhitungkan dalam politik konstruksi dari Negara yang berbeda lebih halus. (Audigier, 2000:20)

Orang-orang mendapatkan pemahaman dan penerimaan budaya politik bangsanya melalui proses yang disebut sosialisasi politik. Istilah sosialisasi politik mengacu pada proses di mana orang belajar peran mereka sebagai warga negara dan mengembangkan pemahaman tentang pemerintah dan politik. Ini mengeksplorasi cara pengetahuan tentang politik tentang sikap pemerintah, proses politik, pemimpin, dan perilaku politik warga yang semuanya merupakan elemen budaya politik Amerika diturunkan dari generasi ke generasi.

Budaya politik membantu membangun komunitas dan memfasilitasi komunikasi karena orang-orang berbagi pemahaman tentang bagaimana dan mengapa peristiwa politik, tindakan, dan pengalaman terjadi di negara mereka. Budaya politik mencakup aturan formal serta kebiasaan dan tradisi, kadang-kadang disebut sebagai "kebiasaan hati," yang diwariskan secara turun-temurun. Orang-orang setuju untuk mematuhi aturan formal tertentu, seperti konstitusi negara dan undang-undang yang dikodifikasikan. Mereka juga hidup dengan aturan yang tidak disebutkan. Misalnya, kesediaan di Amerika Serikat untuk menerima hasil pemilihan tanpa menggunakan kekerasan (Paletz et al, 2012:378).

Individu, kelompok, dan organisasi menggunakan kekuatan bagaimana negara dan bangsa mendefinisikan diri mereka sendiri dan bagaimana interaksi yang kompleks antara negara, bangsa, budaya, dan kekuatan kelompok. Ilmuwan politik sering kali mencoba memilah berbagai bentuk kekuatan yang dapat diasumsikan. Ini berguna dalam memungkinkan kita untuk menganalisis implikasi menggunakan satu jenis kekuatan daripada yang lain. Namun, dalam hubungan politik yang sebenarnya satu jenis kekuasaan jarang ditemukan dalam isolasi dari jenis lainnya. Dalam praktiknya, kekuasaan pada umumnya memiliki kualitas yang dicampur, dengan satu jenis kekuatan yang menyatu dengan yang lain. Konsep pencampuran ini akan menjadi lebih jelas ketika kita mulai melihat jenis kekuasaan yang sebenarnya. Grigsby (2009: 98)

Daya tarik gaya politik harus pasti bergantung pada hasilnya dan penilaian apa pun dari mereka akan membawa kita ke bidang penyelidikan yang dihindari oleh Profesor Oakeshott. Untuk menanyakan gaya politik apakah ia mempromosikan kesejahteraan material, kesetaraan kesempatan atau daerah diperbesar kebebasan adalah untuk menerapkan kriteria yang tidak relevan, dan gaya politik yang bersandar pada mereka untuk panduan pengadilan bencana, menghasilkan hasil disayangkan. Saya tidak ditanya Tapi mungkin: "Dalam hal apa hasilnya tidak menguntungkan? Sulit untuk melihat bagaimana jawaban apa pun yang tidak samar-samar bisa gagal memberikan kriteria yang tidak relevan dan bersaing dengan mengeksplorasi simpati sebagai panduan untuk kegiatan politik.

4. KESIMPULAN

Studi kritis tentang politik adalah penting dalam mempersiapkan masyarakat dalam hal pendidikan politik untuk kepemimpinan di masa depan. Ini dapat membantu mengembangkan kemampuan siswa dalam urusan politik. Dengan demikian, siswa akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengatasi beberapa masalah politik seperti konstitusi yang tidak memadai. Beberapa siswa dapat membantah pentingnya mempelajari politik jika mereka tidak bercita-cita untuk menjadi politisi atau bekerja di lembaga-lembaga publik. Namun demikian, pengetahuan politik yang baik tidak hanya penting dalam pengajaran politik, dalam mengejar karir sebagai politisi profesional, dalam bekerja dipemerintah kementerian, tetapi juga dalam bekerja di banyak lembaga khusus dan organisasi sukarela, dalam pemilihan, dan dalam percakapan tentang politik. pendidikan ideologis dan politik dalam pendidikan orang dewasa, adalah gagasan pendidikan khusus, pendidikan sipil dan politik di luar negeri, tetapi perbedaannya sangat besar. Dan karena beberapa tren modern, seperti "orang dewasa membentuk ide-ide tanpa memerlukan pendidikan ideologis dan politik", "pendidikan ideologis dan politis untuk mahasiswa", yang mengarah ke penelitian teoretis hampir sedikit orang yang terlibat dalam "mahasiswa dewasa". Pendidikan ideologis dan politik di perguruan tinggi dan universitas, Untuk alasan ini, setidaknya satu mata kuliah di perguruan tinggi dalam studi politik harus diwajibkan bagi semua mahasiswa dan beberapa mata kuliah pilihan harus tersedia sehingga pelajaran studi politik dapat dilakukan untuk berbagai tingkatan oleh semua mahasiswa dan masyarakat. Kursus-kursus ini harus ditangani secara kritis dan diterapkan secara kreatif dalam situasi politik yang berlaku di berbagai negara.

REFERENCES

Sumber Dokumen Penelitian

- Audigier, F. (2000). *Council For Cultural Co-operation (CDCC) Project "Education For Democratic Citizenship"*. Education For Democratic Citizenship, 23 (2000). Retrieved From https://www.storiairreer.it/sites/default/files/norme/2000%2006%2026%20Audigier_0.pdf
- Birzea, C. (2000). *Council For Cultural Co-operation (CDCC) Project On "Education For Democratic Citizenship"*. Education For Democratic Citizenship, 21(2000). Retrieved From https://books.google.co.id/books/about/Basic_Concepts_and_Core_Competencies_for.html?id=FO3EtgAACAAJ&redir_esc=y

Sumber Jurnal

- Dery, M., Puopiel, F. (2013). Radio upper west and political education of students in the university for development studies. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 3 (12). Retrieved From <http://www.ijsrp.org/research-paper-1213/ijsrp-p2494.pdf>
- Joseph, S. (2015). Curriculum politics in higher education: what educators need to do to survive. *International Journal Of Higher Education*, 4 (3). Retrieved From <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1060563.pdf>
- Memoli, V., Vassallo, F. (2016). Political activism research: studying the evolution of political behavior. *The Open Journal Of Socio political Studies*, 9 (1). Retrieved From <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco/article/viewFile/15890/13781>
- Moellendorf, D., (2007). Reconciliation as a political value. *Journal of Social Philosophy*, 38 (2). Retrieved From <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-9833.2007.00375.x>
- Nicholson-Crotty, J., Meier K. (2010). Politics, structure, and public policy: the case of higher education. *DeptOf Political Science and George Bush School of Government Texas A&M University*, 43 (48). Retrieved From <https://pdfs.semanticscholar.org/8ee5/07b99508d92621d3ac887b8ea66425494c9b.pdf>
- Pacho, T. (2014). Neccesity of political education. *International Journal Of Innovative Research & amp; Studies*, 3 (11). Retrieved From https://www.researchgate.net/publication/280134321_Necessity_Of_Political_Education
- Sleat, M. (2016). What is political value? political philosophy and fidelity to reality. *Article White Rose*, 33 (1-2). Retrieved From <http://eprints.whiterose.ac.uk/99916/6/Sleat%20What%20is%20political%20value%20-%20social%20philosophy%20and%20policy%20article%20may%202016.pdf>
- Suhay, E., Druckman, James. (2015). The politics of science political value and the production, communication, and reception of scienfic knowledge. *The Annals Of The American Academy* 3 (11). Retrieved From <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0002716214559004?journalCode=anna>
- Yu, R. (2015). Research of main problems in ideological and political education of college and adult education students and countermeasures. *3 rd International Conference on Management, Education, Information and Control*. Retrieved From <https://download.atlantis-press.com/article/25160.pdf>
- Zhang, L. (2015). Analysis on new approaches of ideological and political education in colleges under new media environment. *Creative Education*, 6 (2427-2432). Retrieved From https://file.scirp.org/pdf/CE_2015122916143714.pdf

Sumber Buku

- Dorling, D. (2016). *A better politics how government can make us happier*. London Publishing Partnership. Retrieved From <http://www.dannydorling.org/books/betterpolitics/dorling-betterpolitics.pdf>
- Fraga, L., Givens, T., Pinderhughes, D., et al (2011). *Political science in the 21 st century*. Washington, DC:APSA (American Political Science Association. Retrieved from https://www.apsanet.org/portals/54/Files/Task%20Force%20Reports/TF_21st%20Century_AllPgs_web_res90.pdf
- Grigsby, E. (2009). *Analyzing politics: an introduction to political science*. USA: Cengage Learning. Retrieved From <http://www.nicat-mammadli.narod.ru/b1.html/b35.pdf>
- Paletz, D., Owen, D., Cook, T. (2012). *21 st century American government and politic*. America: Creative Commons. Retrieved From <https://2012books.lardbucket.org/pdfs/21st-century-american-government-and-politics.pdf>
- Seppanen, P., Carrasco, A., Kalalahti, M., et al (2015). *Contrasting dynamics in education politics of extreme*. Rotterdam: Sense Publishers. Retrieved From <https://core.ac.uk/download/pdf/35308659.pdf>